

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan dari instansi adalah untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Kualitas manusia yang dibutuhkan saat ini oleh bangsa Indonesia adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia tersebut dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan kinerja bermutu. Maju mundurnya suatu kapabilitas dari instansi sangat ditentukan oleh pengelolaan manajemen yang teratur. Pada organisasi, pegawai adalah tenaga yang memiliki kemampuan dalam menciptakan keunggulan secara kompetitif. Kualitas dan komitmen dari seorang pegawai merupakan kunci utama keberhasilan sebuah instansi.

Manusia sebagai salah satu sumber daya yang bersifat dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang perlu juga mendapat perhatian dari pihak instansi. Perhatian ini diperlukan mengingat dalam menjalankan aktivitasnya, instansi akan selalu berhadapan dengan sumberdaya manusia yang memiliki dengan pembinaan terhadap sumberdaya manusia perlu mendapatkan perhatian mengingat peran sumberdaya manusia yang besar dalam satu instansi. Untuk mendukung tercapainya tujuan instansi, yang mana instansi mengharapkan pegawai yang produktif, maka instansi harus lebih memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan produktifitas pegawai.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pada hakikatnya merupakan aset utama dan bagian integral dari suatu organisasi maupun instansi MSDM. yang strategis memandang bahwa pegawai pada semua bidang pekerjaan dan tingkat apapun adalah baik secara struktural maupun fungsional. Pegawai merupakan salah satu faktor produksi, oleh karena itu harus dimanfaatkan secara maksimal dan produktif. Tujuan suatu instansi tidak akan dapat terwujud tanpa peran aktif pegawai meskipun alat-alat yang dimiliki instansi begitu canggih dan lengkap khususnya di Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Perkembangan selanjutnya diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung KarangTeluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3254). Pada saat ini Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung ditata dan ditetapkan dengan Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Staf Ahli Walikota Bandar Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tersebut, organisasi Sekretariat Kota Bandar Lampung saat ini terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan membawahi Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi Bagian Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi Bagian Umum, Bagian Perlengkapan dan Bagian Protokol. Kemudian berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, maka Sekretariat Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi penyusunan

kebijakan Pemerintah Daerah, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perangkat Daerah, Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan utama di dalam pemerintahan. Selain belanja pegawai, pemerintah juga melakukan belanja modal, belanja barang, dan belanja lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional serta memenuhi kewajibannya kepada rakyat. Belanja pemerintah sebagian besar dilakukan melalui prosedur yang disebut pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa (*procurement*) adalah perolehan barang atau jasa yang layak dan diperoleh secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pembeli sesuai spesifikasi yang diinginkan dalam hal kuantitas, kualitas, lokasi dan waktunya (Van Weele, 2010).

Selain mendukung operasional pemerintahan, kegiatan pengadaan barang dan jasa juga menjadi stimulus bagi perekonomian sebuah negara. Teori ekonomi makro yang diungkapkan John Maynard Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) memiliki dampak penggandaan (*multiplier effect*) pada perekonomian. Ramadhani dan Sugiyanto (2014) mendefinisikan dampak penggandaan sebagai dampak perubahan pada pendapatan domestik bruto (PDB) akibat perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Sebagai ilustrasi, pengadaan kertas yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kemampuan ekonomi pabrik kertas. Peningkatan kemampuan ekonomi pabrik kertas akan menstimulasi peningkatan pada industri kayu sebagai bahan baku kertas. Dalam prosesnya, terdapat ribuan bahkan ratusan ribu individu yang terlibat, di antaranya pegawai pabrik, distributor, pemilik properti, dan lain-lain. Efisiensi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya akan mempengaruhi kualitas pelayanan pemerintah, namun juga pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, kualitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan faktor yang penting bagi kemajuan sebuah negara.

Menjamin kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pengadaan yang efisien dan berintegritas akan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang terjadi saat ini masih dinilai belum ideal. Menurut data yang dirilis oleh *Indonesia Procurement Watch* (IPW), 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan PBJ (Narotama, 2013). Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya korupsi, sekaligus menyederhanakan proses birokrasi pengadaan barang dan jasa. Regulasi terkait pengadaan barang dan jasa menjadi penting mengingat anggaran belanja pemerintah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.951,26 triliun rupiah (Bachtiar *et al.*, 2016).

Setiap tahun realisasi belanja pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Hal ini wajar mengingat perekonomian nasional juga terus bertumbuh dan pendapatan negara cenderung meningkat (Kusuma, 2012). Pada tahun 2020 terjadi peningkatan belanja yang tajam yaitu naik sebesar 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi di hampir seluruh jenis belanja. Kenaikan yang signifikan terjadi pada belanja barang dan bantuan sosial. Hal ini terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19 melalui belanja barang, serta untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan sosial. Di tahun 2021, RAPBN masih merencanakan defisit anggaran sesuai dengan kebijakan pandemi dengan rencana belanja naik dari tahun sebelumnya sebesar 6,5%. Saat penelitian ini ditulis, pemerintah belum merilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2021 (Sudiarianti *et al.*, 2015).

Belanja pemerintah memiliki peran krusial dalam berbagai dimensi. Khusaini (2019) mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian negara terdiri dari 3 aspek yaitu:

1. Peran distribusi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang dirumuskannya. Kesejahteraan ini dibangun

dengan cara meningkatkan output perekonomian dan melakukan pemerataan kekayaan. Distribusi kekayaan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pajak dan instrumen lainnya. Dengan adanya peran distribusi ini, kekayaan tidak berputar di sebagian kalangan saja sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat hidup sejahtera (Sukmana, 2016).

## 2. Peran alokasi

Sebuah negara memiliki tanggung jawab memberikan kesejahteraan di seluruh wilayahnya. Adanya kesenjangan perekonomian antar wilayah akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan. Perekonomian Jakarta yang gemerlap jauh lebih hidup daripada perekonomian di wilayah Papua. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sarana dan infrastruktur antar wilayah. Dalam kondisi ini, pemerintah hadir melakukan alokasi dana untuk membangun wilayah lain agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan.

## 3. Peran stabilisasi

Perekonomian dalam jangka panjang selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan ini seringkali berdampak besar seperti krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi, pemerintah turun tangan melakukan kebijakan stabilisasi. Di antara bentuk stabilisasi adalah dengan meningkatkan tarif pajak saat terjadi economic boom serta meningkatkan pengeluaran (defisit) saat periode resesi atau krisis ekonomi.

Menurut Penelitian Agustina (2014) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sistem pengendalian internal dan kualitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada prosedur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri. Penelitian Astuti (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas SDM (panitia) dan pengendalian internal (lingkungan pengendalian) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa dalam kaitannya dengan mencegah kecurangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, penelitian yang dilakukan Gusnita *et al* (2019) menyimpulkan bahwa kualitas SDM (panitia pengadaan) dan lingkungan pengendalian menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas pengadaan barang dan jasa.

Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara agar tercipta SDM aparatur yang profesional, berkualitas dan bermoral tinggi, untuk mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan tugas yang krusial dan cakupan wilayah kerja yang luas, Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung memiliki tantangan sendiri untuk mengelola pengadaan barang dan jasanya. Mengukur pengaruh kompetensi SDM dan penerapan SPIP terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung akan mampu memberikan arah kepada pemangku kepentingan, khususnya di Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengadaannya.

Dampak negatif tersebut disebabkan penerapan sistem pengadaan yang memberikan peluang bertemunya penyedia/rekanan dengan panitia pengadaan. Pertemuan tersebut terindikasi awal terciptanya persekongkolan pelaksanaan tender. Aktivitas tatap muka akan membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (Jasin *et. al*, 2017).

Fenomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu adanya penemuan sejumlah proyek milik Bagian perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bandar Lampung justru terindikasi sarat penyimpangan. Dugaan penyimpangan beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme ini terjadi mulai dari kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjelaskan munculnya *procurement fraud* pada metode konvensional disebabkan oleh informasi harga dan barang terbatas, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (fragmented), persaingan usaha tidak sehat atau premanisme, bad governance, persekongkolan, SDM pengadaan terbatas, kredibilitas proses tidak terjamin. Hal tersebut merupakan salah satu dari kelemahan pengadaan barang dan jasa secara konvensional (sumber: [www.harianpilar.com](http://www.harianpilar.com), 2023).

Penelitian ini merupakan replikasi, pengembangan dan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan (2018). Pangaribuan (2018) mengukur kinerja pengadaan dengan variabel independen implementasi *e-procurement* dan kompetensi. Penelitian ini mengukur pengaruh kompetensi SDM dan pengendalian internal terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah serta etos kerja sebagai moderasi. Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Pangaribuan (2018) yaitu: Peneliti memperluas responden tidak hanya pegawai dengan jabatan fungsional pengadaan saja, namun juga pegawai yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa seperti pejabat pembuat komitmen (PPK), staf PPK, auditor, maupun pejabat struktural. Hal ini akan meningkatkan objektivitas hasil kuisioner. Peneliti mengganti variabel implementasi *e-procurement* dengan pengendalian internal, hal ini karena dalam kondisi terkini implementasi *e-procurement* telah relatif stabil. Selain itu sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) belum terlalu familiar di tengah pegawai sehingga dinilai lebih tepat untuk diangkat sebagai variabel penelitian, serta menambah etos kerja sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian masalah di atas latar belakang dan *gap research* di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Optimalisasi Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung: Peran Kompetensi Pegawai, Pengendalian internal Dan Etos Kerja**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung?
3. Apakah etos kerja berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung?

4. Apakah kompetensi pegawai, pengendalian internal dan etos kerja berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

#### 1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah pegawai di Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

#### 1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Objek ruang lingkup objek penelitian ini adalah pengaruh kompetensi pegawai dan pengendalian internal terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung serta etos kerja sebagai moderasi.

#### 1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Tempat atau lokasi penelitian ini Kantor Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung.

#### 1.3.4 Ruang Lingkup Waktu

No	Waktu Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Judul				
2	Penyusunan <i>draft</i> proposal				
3	Penulusuran literatur dan identifikasi masalah serta penyusunan landasan teori dan metodologi				
4	Pembahasan dan diskusi <i>draft</i> proposal dengan pembimbing				
5	Seminar Proposal				
6	Penyusunan kuesioner (Instrumen Penelitian)				
7	Pendistribusian kuesioner dan pengambilan Data				
8	Pengolahan data dan analisis data				
9	Penyusunan draft tesis				
10	Ujian Tesis				

### **1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu Penelitian**

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah Ilmu Manajemen yang lebih banyak berbicara tentang pengaruh kompetensi pegawai dan pengendalian internal terhadap produktivitas kerja pegawaiserta etos kerja sebagai moderasi dan karakteristik demografi mengenai usia, jenis kelamin, masa kerja dan pendidikan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui pengaruh etos kerja terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Mengetahui pengaruh kompetensi pegawai, pengendalian internal dan etos kerja terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung

### **1.5 Manfaat Penelitian**

**Manfaat penelitian ini adalah:**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang ilmu manajemen sumber daya manusia sebagai informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga dapat menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat membantu bagi instansi dalam melakukan penilaian terhadap produktivitas kerja.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis tentang materi yang diteliti, sebagai media untuk menuangkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang Lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan tentang pengaruh kompetensi pegawai dan pengendalian internal terhadap produktivitas kerja pada pegawai.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisikan tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, operasional variabel, teknik analisis data, uji persyaratan instrumen, metode analisis data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum, hasil penelitian serta pembahasan implikasi manajerial dari hasil penelitian yang telah dilakukan

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.